

## Determinasi Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Jawa: Peran Indeks Pembangunan Manusia, Partisipasi Angkatan Kerja, dan Upah Minimum Provinsi

Aprillia Nilasari<sup>1</sup>, Ruth Eviana Hutabarat<sup>2</sup>, Alfi Hikmatul Maulidah<sup>3</sup>, Nikmatun Nazilah<sup>4</sup>,  
Linda Ayu Tivani<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Economics Study Program/Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

<sup>2</sup>Economics Study Program/Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

<sup>3</sup>Economics Study Program/Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

<sup>4</sup>Economics Study Program/Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

E-mail: [aprillianilasari@unesa.ac.id](mailto:aprillianilasari@unesa.ac.id)<sup>1</sup>, [ruthhutabarat@unesa.ac.id](mailto:ruthhutabarat@unesa.ac.id)<sup>2</sup>

[alfi.22149@mhs.unesa.ac.id](mailto:alfi.22149@mhs.unesa.ac.id)<sup>3</sup>, [nikmatun.22156@mhs.unesa.ac.id](mailto:nikmatun.22156@mhs.unesa.ac.id)<sup>4</sup>, [linda.22156@mhs.unesa.ac.id](mailto:linda.22156@mhs.unesa.ac.id)<sup>5</sup>

### Article History:

Received: 23 April 2026

Revised: 02 Mei 2026

Accepted: 05 Mei 2026

**Keywords:** *HDI, labor force participation rate, provincial minimum wage, GRDP growth, panel data regression*

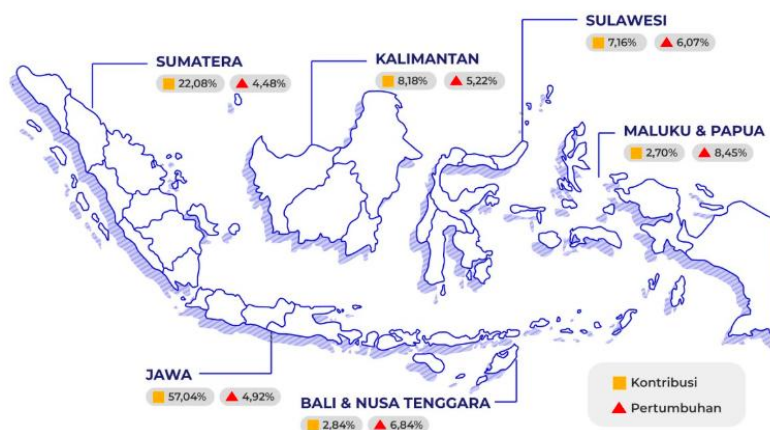
**Abstrak:** *Pulau Jawa merupakan pulau dengan kontribusi perekonomian terbesar namun memiliki partisipasi yang berbeda-beda antar provinsi diakibatkan adanya perbedaan struktur ekonomi, tingkat pendidikan, dan urbanisasi dalam peningkatan pertumbuhan PDRB per Kapita. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh indeks Pembangunan manusia, TPAK, dan UMP terhadap pertumbuhan PDRB pada periode 2015–2024 di Pulau Jawa. Metode analisis regresi data panel menunjukkan hasil negatif signifikan antara IPM terhadap PDRB, karena IPM merupakan investasi jangka panjang sehingga tidak secara langsung berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi, sedangkan variabel TPAK menunjukkan hasil negatif tidak signifikan terhadap PDRB, hal ini disebabkan adanya ketidakselarasan antara keterampilan yang dimiliki pekerja dengan kebutuhan sektor produktif. Dan variabel UMP menunjukkan hasil yang positif signifikan terhadap PDRB, hubungan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan upah dapat menjadi instrumen pertumbuhan yang baik jika didukung oleh struktur ekonomi yang kuat.*

### PENDAHULUAN

Kondisi sosial ekonomi suatu wilayah dapat dinilai melalui Pertumbuhan Ekonomi. Tolak ukur ini dihitung berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) pada tingkat nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat daerah. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang stabil serta berkesinambungan adalah lanjutan proses pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah ditandai juga dengan peningkatan produksi barang dan jasa, yang merupakan proses peningkatan berkelanjutan untuk mencapai perekonomian dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah total nilai seluruh barang dan jasa akhir

yang diproduksi di suatu wilayah dalam periode tertentu, yang mencakup kontribusi dari semua sektor ekonomi yang beroperasi di daerah tersebut (Khairunnida & Utomo, 2024). Menurut BPS (2023) PDRB pada dasarnya merupakan jumlah seluruh nilai tambah yang dihasilkan oleh setiap kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu selama periode waktu tertentu. Pulau Jawa, yang terkenal dengan kepadatannya, merupakan rumah bagi 55,89% populasi Indonesia menurut BPS. Wilayahnya membentang dari Banten di barat hingga Jawa Timur di timur, meliputi enam provinsi: Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur.



Sumber: BPS, Jawa Timur, 2024 (Data diolah)

**Gambar 1.** Kontribusi dan Pertumbuhan PDRB Menurut Wilayah

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa Pulau Jawa memberikan kontribusi ekonomi tertinggi di Indonesia, yaitu sebesar 57,04%, jauh melampaui wilayah. Namun, tingkat pertumbuhan ekonominya hanya 4,92%, lebih rendah dibandingkan kawasan timur. Fenomena ini menunjukkan adanya ketimpangan antara tingkat kontribusi dan pertumbuhan ekonomi antar wilayah di Indonesia. Pulau Jawa masih menjadi pusat aktivitas ekonomi nasional karena dominasi industri, infrastruktur yang lebih maju, dan konsentrasi penduduk yang tinggi, tetapi pertumbuhan yang lambat menandakan adanya tantangan dalam pemerataan pembangunan dan keberlanjutan ekonomi di masa depan.

Meskipun Pulau Jawa menjadi pusat ekonomi nasional, terdapat dinamika penting terkait kualitas penduduk, pasar tenaga kerja, dan kebijakan upah yang menunjukkan pola tidak merata antar provinsi. Menurut data BPS, nilai IPM di beberapa provinsi seperti DKI Jakarta dan DI Yogyakarta cenderung tinggi, namun tidak selalu sejalan dengan tingkat pertumbuhan ekonominya. Provinsi dengan TPAK tinggi, seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur, juga tidak selalu menunjukkan kinerja ekonomi terbaik, mengindikasikan bahwa tingginya angkatan kerja belum sepenuhnya terserap oleh sektor produktif. Di sisi lain, kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang relatif cepat di wilayah industri memunculkan tekanan biaya produksi, yang dapat berdampak pada relokasi industri atau penurunan ekspansi usaha. Ketiga variabel ini memperlihatkan adanya ketidaksinkronan antara kualitas SDM, kapasitas tenaga kerja, kebijakan pengupahan, dan hasil pertumbuhan ekonomi di berbagai provinsi di Pulau Jawa.

Selain kontribusi ekonomi yang tinggi, salah satu faktor penting yang mempengaruhi dinamika ekonomi di Pulau Jawa adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Secara umum, IPM merupakan indikator komposit yang digunakan untuk mengukur kualitas pembangunan manusia melalui tiga dimensi utama, yaitu kesehatan, pendidikan, serta standar hidup layak (Eka Siburian et al., 2024). Menurut *United Nations Development Programme* (2020), IPM mencerminkan sejauh mana suatu wilayah mampu memberikan kesempatan yang setara bagi

masyarakatnya untuk mengembangkan potensi diri dan meningkatkan kesejahteraan. Dalam Teori Pertumbuhan Endogen yang dikemukakan oleh Robert Lucas (1988), menyatakan bahwa akumulasi modal manusia (*Human Capital*) merupakan pendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dimana investasi pada pendidikan, keterampilan, serta peningkatan kualitas tenaga kerja akan menciptakan efek eksternalitas positif yang mampu mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi tanpa harus bergantung pada faktor eksternal. Dengan demikian, TPAK yang tinggi akan memberikan dampak optimal terhadap pertumbuhan ekonomi apabila didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang baik. Artinya, sinergi antara peningkatan partisipasi kerja (TPAK) dan peningkatan IPM akan memperkuat daya saing ekonomi daerah serta mempercepat laju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Martin (2025) melakukan penelitian 34 provinsi di Indonesia dan menemukan bahwa IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Kusno et al. (2023) meneliti Provinsi Jawa Timur dan menemukan bahwa IPM juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui GRDP. Penelitian Purba et al. (2024) menemukan bahwa di Provinsi Sumatera Utara, variabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dengan demikian, temuan-temuan tersebut memperkuat pandangan bahwa investasi pada kualitas sumber daya manusia dan optimalisasi tenaga kerja merupakan faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Adapun aspek lain yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi selain IPM dan TPAK, yaitu besaran upah minimum provinsi (UMP). Todaro & Smith (2011) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai perkembangan kemampuan suatu negara dalam jangka panjang untuk menyediakan berbagai produk ekonomi bagi warganya. Adanya kenaikan upah minimum memperkuat daya beli tenaga kerja, sehingga berpotensi meningkatkan motivasi dan hasil kerja mereka (Yuan et al., 2025). Dalam penelitian Lubis dan Murtala (2021) membuktikan bahwa UMP signifikan dalam memberi pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Aceh. Hal tersebut menunjukkan bahwa Peningkatan upah minimum mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan daya beli. Naiknya pendapatan tenaga kerja akan meningkatkan konsumsi masyarakat terhadap barang dan jasa lokal, yang selanjutnya menggerakkan sektor perdagangan dan jasa. Imbas positifnya, aktivitas ekonomi dan PDRB kabupaten tersebut pun terdongkrak (Khairunnida & Utomo, 2024).

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan Upah Minimum Provinsi (UMP) berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa. Perbedaan utama penelitian ini dibandingkan penelitian sebelumnya terletak pada cakupan wilayah dan fokus variabel yang dianalisis. Jika sebagian besar penelitian terdahulu hanya berfokus pada satu provinsi atau menggunakan satu variabel ketenagakerjaan tertentu, penelitian ini secara spesifik menelaah enam provinsi di Pulau Jawa secara komprehensif, yang merupakan pusat aktivitas ekonomi nasional. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai dinamika pembangunan dan ketenagakerjaan di kawasan dengan kontribusi ekonomi terbesar di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder yang diperoleh dari BPS. Secara lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 1 dapat diperoleh informasi terkait dengan

definisi operasional masing-masing variabel beserta sumber datanya. Variabel bebas dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis, yaitu variabel indeks pembangunan manusia, tingkat partisipasi angkatan kerja dan upah minimum provinsi. Lebih lanjut, dalam penelitian ini digunakan seri data pada periode 2015–2024 yang kemudian dimodelkan dalam satu spesifikasi model, yaitu (1) model umum keseluruhan provinsi yang ada di pulau jawa dengan total amatan cross sectional sebanyak 6 provinsi.

**Tabel 1. Definisi Operasional Variabel**

Variabel	Definisi	Sumber data
<b>Variable Dependen</b> <b>Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB<sub>it</sub>)</b>	Produk Domestik Regional Bruto Pulau Jawa periode tahun 2015-2023 yang diukur dengan menggunakan dasar harga konstan. Untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap lapangan usaha dari tahun ke tahun, dalam satuan Milliar Rupiah	BPS 2015-2024
<b>Indeks Pembangunan Manusia (IPM<sub>it</sub>)</b>	Persentase kualitas pembangunan manusia di suatu daerah. Dilihat dari sisi pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya, dalam satuan persen	BPS 2015-2024
<b>Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja(TPAK<sub>it</sub>)</b>	Persentase penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi, yaitu bekerja atau menganggur namun sedang mencari pekerjaan, dalam satuan persen	BPS 2015-2024
<b>Upah Minimum Provinsi (UMP<sub>it</sub>)</b>	Standar upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok ditambah tunjangan tetap yang wajib dibayarkan kepada karyawan yang berlaku di tingkat Provinsi, dalam satuan Rupiah	BPS 2015-2024

Sumber : BPS Jawa Timur, 2024

Studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif, karena tujuan utamanya adalah untuk mengetahui seberapa kuat hubungan antar variabel yang diteliti (Sugiyono, 2019). Penelitian ini menggunakan regresi linear berganda menggunakan data panel. Data panel sendiri adalah kombinasi dari *cross-section* dan *time series* data. Untuk melakukan analisis, perangkat lunak Stata 14 digunakan untuk melakukan pengujian statistik terhadap variabel-variabel yang telah dikumpulkan. Data yang digunakan berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Tahap pertama melibatkan estimasi model regresi dari data panel. Sebagai contoh, model persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$$PDRB_{it} = \beta_0 + \beta_1 IPM_{it} + \beta_2 TPAK_{it} + \beta_3 UMP_{it} + \mu_{it}$$

Keterangan:

PDRB <sub>it</sub>	= Pertumbuhan Ekonomi
IPM <sub>it</sub>	= Indeks Pembangunan Manusia
TPAK <sub>it</sub>	= Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
UMP <sub>it</sub>	= Upah Minimum Regional
i	= Cross Section
t	= Time Series

$\beta_0$	= Intercept
$\beta_{1,2,3}$	= Koefisien Regresi
$\mu$	= Error Term

Berikut ini adalah tahapan-tahapan regresi data panel yang digunakan di dalam penelitian ini: (1) menentukan variabel bebas dan tidak bebas. Variabel bebas yang digunakan di dalam penelitian ini adalah indeks pembangunan manusia, tingkat partisipasi angkatan kerja, upah minimum regional. Adapun variabel tidak bebas yang digunakan adalah Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan; (2) memilih model regresi data panel terbaik. Tahapan pemilihan model regresi data panel terbaik dilakukan untuk memilih di antara model *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM) yang digunakan didalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan uji Chow dan Hausman dalam pemilihan model terbaik. Uji Chow digunakan untuk mengetahui model terbaik antara CEM dengan FEM, sedangkan uji Hausman digunakan untuk mengetahui model ter baik antara FEM dengan REM; (3) memilih metode estimasi. Pada penelitian ini, model terbaik yang terpilih adalah FEM; (4) melakukan uji asumsi klasik; (5) Langkah berikutnya adalah melakukan uji asumsi klasik guna memastikan kelayakan model regresi yang digunakan. Uji tersebut meliputi uji multikolinearitas, autokorelasi dan heteroskedastisitas dengan tujuan untuk memastikan bahwa model regresi memenuhi syarat sebagai model yang baik dan layak digunakan dalam penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan menguji signifikansi parameter regresi data panel berupa uji parsial (Uji-t), uji simultan (Uji-f) dan koefisien determinasi R<sup>2</sup> .

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Chow Test

Proses penentuan apakah model yang tepat adalah *Common Effect* atau *Fixed Effect* dimulai dengan mengestimasi model *Common Effect* terlebih dahulu. Hasil estimasi tersebut kemudian dijadikan dasar untuk melakukan uji Chow sebagai langkah pemilihan model yang paling sesuai. Adapun hasil dari Uji Chow ditunjukkan sebagai berikut :

**Tabel 2.** Hasil *Chow Test*

Effects Test	Statistic	Prob.
Cross-section F	104.66	0.0000

Sumber: Data diolah, (Stata 14.0)

Dari hasil uji Chow Test, nilai *Cross-section F* yang didapat adalah 104,66 dengan probabilitas 0,000. Karena probabilitas ini di bawah 0,05, hipotesis nol (H<sub>0</sub>) ditolak dan hipotesis alternatif (H<sub>a</sub>) tidak ditolak. Ini berarti model *Fixed Effect* adalah pilihan terbaik untuk menguji hipotesis dalam studi ini.

### Hasil Hausman Test

Berdasarkan hasil uji Chow, diketahui bahwa H<sub>0</sub> ditolak. Oleh karena itu, langkah analisis selanjutnya adalah melakukan uji Hausman. Sebelum pengujian dilakukan, tahap awal melibatkan proses estimasi model regresi data panel dengan metode random effects. Setelah model berhasil diestimasi, uji Hausman diterapkan pada hasil estimasi tersebut. Adapun ringkasan hasil uji Hausman yang telah diperoleh adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.** Hasil *Hausman Test*

Test Summary	Statistic	Prob.
Cross-section random	11.22	0.0037

Sumber: Data diolah, (Stata 14.0)

Hasil uji Hausman menunjukkan nilai *Chi-square* sebesar 11.22, dengan probabilitasnya mencapai 0.0037, yang ternyata lebih rendah dari 0.05. Berdasarkan temuan ini, bisa disimpulkan bahwa model Fixed Effect adalah pilihan terbaik untuk melakukan estimasi regresi pada data panel.

#### Hasil Estimasi dengan *Fixed Effect Model*

Hasil estimasi *fixed effect model*, yang mencakup koefisien regresi dan ukuran statistik, disajikan dalam Tabel 4 di bawah ini :

**Tabel 4.** Koefisien Korelasi dan Ukuran Statistik *Fixed Effect Model*

Variabel	Koefisien	t-statistic	Prob.
C	222891.2	3.72	0.000
X1	-2626.801	- 2.18	0.034
X2	-306.0435	- 0.64	0.524
X3	.0233082	8.73	0.000
<i>R-Square</i>	0.5931		
<i>F-Statistic</i>	477.37		
<i>Prob. F-Statistic</i>	0.0000		

Sumber: Data diolah, (Stata 14.0)

Berdasarkan hasil estimasi Model *Fixed Effect*, konstanta bernilai 222.891,2 dengan tingkat signifikansi 0.000, yang menunjukkan bahwa ketika seluruh variabel independen bernilai nol, maka nilai variabel dependen berada pada angka tersebut. Variabel IPM memiliki koefisien sebesar  $-2626.801$  dengan nilai probabilitas  $0.034 < 0.05$ . Hal ini menunjukkan bahwa IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel dependen, sehingga setiap peningkatan IPM sebesar 1 satuan akan menurunkan nilai Pertumbuhan Ekonomi sebesar 2626.801. Variabel TPAK memiliki koefisien  $-306.0435$  dengan nilai probabilitas  $0.524 > 0.05$ , sehingga pengaruh TPAK terhadap Pertumbuhan Ekonomi bersifat negatif namun tidak signifikan. Artinya, perubahan nilai TPAK tidak memberikan dampak berarti terhadap perubahan variabel dependen. Variabel Upah Minimum memiliki koefisien 0.0233082 dan nilai probabilitas  $0.000 < 0.05$ , yang menunjukkan bahwa Upah Minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen. Setiap peningkatan Upah Minimum sebesar 1 satuan akan meningkatkan nilai Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0.0233 secara signifikan.

Nilai *R-Square* sebesar 0.5931 menunjukkan bahwa 59,31% variasi dalam variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel IPM, TPAK, dan Upah Minimum. Sementara itu, nilai *F-Statistic* sebesar 477.37 dengan probabilitas 0.000 menegaskan bahwa model secara keseluruhan signifikan, sehingga variabel-variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen dalam model *Fixed Effect* ini, sedangkan 40,69% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model, seperti investasi, belanja pemerintah, inflasi, struktur ekonomi dan variabel lain yang mempengaruhi PDRB untuk penelitian jangka panjang.

## Pembahasan

### Pengaruh IPM Terhadap Pertumbuhan Domestik Regional Bruto

Berdasarkan hasil analisis regresi data panel menggunakan *fixed effect model*, menunjukkan bahwa IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PDRB Pulau Jawa. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan IPM selama periode penelitian belum secara langsung mendorong PDRB. Hasil ini berbeda dengan pandangan umum dan hasil penelitian terdahulu yang menemukan bahwa kualitas sumber daya manusia akan meningkatkan pertumbuhan

ekonomi, namun hal ini masih bisa dijelaskan secara teoritis. Menurut teori *Human Capital* Becker (1964), investasi pada bidang pendidikan, kesehatan, dan keterampilan merupakan bentuk modal manusia yang akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Namun manfaat investasi tersebut memiliki sifat jangka panjang sehingga dampaknya pada pertumbuhan ekonomi tidak selalu langsung dapat terlihat dalam jangka pendek. Artinya kenaikan IPM saat ini baru akan menghasilkan peningkatan output di masa mendatang.

Selain itu dalam teori Konvergensi Neoklasik dari Solow (1956) menjelaskan bahwa wilayah yang telah mencapai tingkat pembangunan tinggi cenderung mengalami perlambatan pertumbuhan karena adanya *diminishing return* terhadap modal dan tenaga kerja. Pada penelitian ini yang menggunakan Pulau Jawa sebagai lokasi penelitian, provinsi-provinsi dengan nilai IPM yang tinggi seperti DKI Jakarta, Jawa Timur dan DI Yogyakarta cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi sehingga pertumbuhan ekonomi wilayah-wilayah tersebut menjadi lebih lambat dibanding wilayah yang sedang berkembang. Selanjutnya teori *mismatch tenaga kerja* juga mampu menjelaskan hasil temuan dalam penelitian ini dimana menurut Scultz (1961) menyatakan bahwa investasi pendidikan akan memberikan dampak yang efektif jika didukung oleh pasar tenaga kerja yang mampu menyerap tenaga kerja terdidik secara produktif. Jika hal tersebut tidak terpenuhi maka peningkatan IPM menjadi tidak optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Selanjutnya, hasil di atas tidak sejalan dengan penelitian-penelitian terdahulu, seperti penelitian oleh Sari dkk. (2020) dan Patricia et al. (2025) menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi. Melalui analisis tersebut, mereka menemukan bahwa peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, serta standar hidup layak yang merupakan komponen utama IPM berkontribusi positif terhadap peningkatan output ekonomi daerah. Temuan ini menunjukkan bahwa ketika masyarakat memiliki akses terhadap layanan dasar yang lebih baik, produktivitas tenaga kerja meningkat, dan kemampuan individu untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi juga semakin besar. Secara empiris, penelitian tersebut mengonfirmasi bahwa daerah dengan tingkat IPM lebih tinggi cenderung menunjukkan kinerja ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan, sehingga memperkuat argumen bahwa pembangunan manusia merupakan fondasi utama pertumbuhan ekonomi daerah.

Penelitian selanjutnya oleh Adim (2024) menunjukkan bahwa IPM sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor struktural seperti kemiskinan dan pengangguran, yang keduanya memiliki hubungan erat dengan kualitas hidup masyarakat. Melalui analisis data IPM Indonesia tahun 2018–2022, penelitian tersebut menemukan bahwa semakin tinggi tingkat kemiskinan dan pengangguran di suatu wilayah, semakin terhambat pula peningkatan IPM. Temuan ini menegaskan bahwa kebijakan pembangunan manusia tidak dapat dipisahkan dari intervensi multidimensi, mulai dari pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, hingga penyediaan layanan dasar pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian, IPM menjadi indikator yang sangat sensitif terhadap dinamika sosial dan ekonomi, sekaligus mencerminkan efektivitas kebijakan publik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Lebih lanjut temuan tersebut ditegaskan pula oleh Harsono, dkk. (2024) dalam studi yang dipublikasikan oleh *Majalah Sains dan Edukasi Jurnal (MSEJ)*, yang menunjukkan bahwa peningkatan IPM sangat dipengaruhi oleh belanja pendidikan, belanja kesehatan, dan program bantuan sosial di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Peningkatan investasi pemerintah pada sektor-sektor tersebut terbukti mampu memperkuat kualitas sumber daya manusia, yang kemudian berdampak pada peningkatan produktivitas tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Meskipun hasil ini tidak relevan dengan beberapa penelitian terdahulu, namun secara teoritis hasil ini dapat dipertanggungjawabkan. Pengaruh negatif dari IPM tidak serta merta menunjukkan bahwa IPM merugikan perekonomian, namun mencerminkan bahwa manfaat IPM memerlukan waktu, pemerataan kualitas pendidikan, serta penyerapan tenaga kerja yang lebih baik di sektor- sektor yang sesuai dengan kualifikasi yang dimiliki.

#### **Pengaruh TPAK terhadap Produk Domestik Regional Bruto**

Hasil analisis regresi penelitian ini menunjukkan bahwa variabel TPAK berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap PDRB di Pulau Jawa. Artinya peningkatan partisipasi angkatan kerja belum mampu memberikan dampak signifikan pada pertumbuhan PDRB. Hasil ini dapat dijelaskan oleh teori Ketenagakerjaan Lewis (1954). Teori ini menjelaskan bahwa dalam model dual sektor, pertumbuhan ekonomi akan meningkat apabila tenaga kerja berpindah dari sektor tradisional dengan produktivitas rendah ke sektor modern dengan produktivitas yang tinggi. Ketika tenaga kerja yang terserap adalah tenaga kerja di sektor informal atau sektor dengan produktivitas rendah maka peningkatan angkatan kerja tidak mampu memberikan dampak besar terhadap kenaikan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya oleh Todaro dan Smith (2011), kebanyakan di negara berkembang mengalami masalah pertumbuhan jumlah angkatan kerja yang lebih cepat dibandingkan penciptaan lapangan kerja produktif. Akibatnya terjadi kenaikan pengangguran terutama pengangguran terselubung sehingga produktivitas tenaga kerja menjadi rendah dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks Pulau Jawa sebagai lokasi penelitian, tingginya TPAK belum mampu meningkatkan kualitas dan keterampilan tenaga kerja, inovasi, dan penyerapan tenaga kerja pada sektor formal. Hal ini menyebabkan meskipun jumlah angkatan kerja meningkat namun belum memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara signifikan.

#### **Pengaruh Upah Minimum Provinsi Terhadap Produk Domestik Regional Bruto**

Berdasarkan hasil analisis regresi pada penelitian ini menunjukkan hasil bahwa UMP berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa. Hasil ini menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum provinsi mampu menggerakkan peningkatan aktivitas ekonomi regional sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat. Hasil ini sebagaimana teori Keynes tentang Upah yang menyebutkan bahwa, peningkatan pendapatan masyarakat akan meningkatkan konsumsi agregat. Konsumsi agregat merupakan komponen utama dari permintaan agregat sehingga kenaikan upah secara efektif mendorong kenaikan permintaan barang dan jasa sehingga pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat. Selanjutnya teori Efficiency Wage oleh Akerlof and Yellen (1986) menguatkan bahwa upah yang lebih tinggi dapat meningkatkan motivasi, produktivitas, loyalitas tenaga kerja, dan menurunkan turnover tenaga kerja sehingga produktivitas meningkat dan pertumbuhan ekonomi juga mengalami peningkatan. Pada Pulau Jawa hal tersebut didukung oleh struktur ekonomi Pulau Jawa yang merupakan pusat industri dan konsumsi nasional, sehingga kenaikan UMP berpotensi menjadi peningkatan daya beli masyarakat dan ekspansi kegiatan ekonomi. Maka dari itu kebijakan upah minimum yang proporsional penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus melindungi industri dan mencegah pengangguran.

Berdasarkan hasil dari penelitian-penelitian terdahulu terkait UMP dan Pertumbuhan Ekonomi memperkuat hasil penelitian ini. Mauludi dkk. (2023) menemukan bahwa upah minimum memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional, karena pendapatan yang lebih tinggi mendorong konsumsi rumah tangga dan meningkatkan aktivitas ekonomi daerah. Dengan demikian, kebijakan upah minimum bukan hanya menjadi instrumen perlindungan sosial, tetapi juga berperan sebagai motor penggerak perekonomian lokal.

Kebijakan kenaikan upah minimum memiliki implikasi penting terhadap pembangunan manusia karena secara langsung meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar. Aziz dan Husenudin (2024) menemukan bahwa upah minimum berpengaruh signifikan dalam menurunkan kemiskinan di Jawa Barat, di mana upah minimum merupakan komponen penting dalam pembangunan manusia. Semakin tinggi upah maka kemampuan akses kehidupan akan semakin baik. Penelitian Ghinastri dan Syafitri (2024) menunjukkan bahwa UMK berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat pada periode 2017–2021, yang berarti semakin tinggi UMK yang ditetapkan, semakin rendah tingkat kemiskinan yang terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa Upah secara efektif mampu mengurangi kemiskinan melalui mekanisme peningkatan pendapatan pekerja, yang kemudian meningkatkan konsumsi, mengurangi kerentanan ekonomi, serta mendorong aktivitas ekonomi lokal secara lebih merata. Temuan ini menegaskan bahwa kebijakan Upah minimum bukan hanya instrumen regulatif yang mengatur minimal standar hidup, tetapi juga merupakan komponen strategis dalam kebijakan pembangunan daerah yang berorientasi pada pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Temuan Erian dan Sari (2022) memperkuat hal ini dengan menunjukkan bahwa peningkatan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan UMK berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas serta keberlanjutan ekonomi daerah.

#### **Pengaruh IPM, TPAK, dan UMP terhadap Produk Domestik Regional Bruto**

Berdasarkan hasil analisis regresi data panel dengan menggunakan *fixed effect model (FEM)*, dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel IPM, TPAK dan UMP memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PDRB. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa tidak hanya ditentukan oleh satu faktor, melainkan hasil interaksi antara beberapa faktor, yakni kualitas sumber daya manusia, dinamika pasar tenaga kerja, dan kebijakan pengupahan. Pada perspektif teori pertumbuhan ekonomi modern, pertumbuhan *uotput* regional dipengaruhi kombinasi dari modal manusia, tenaga kerja dan modal fisik serta efisiensi kelembagaan. Maka dari itu ketiganya secara bersama-sama memiliki peranan penting dalam membentuk kapasitas produksi dan permintaan agregat daerah. Hasil ini sejalan dengan teori *Endogenous Growth* yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh akumulasi modal manusia dan efisiensi tenaga kerja, serta didukung oleh teori Keynesian yang menekankan pentingnya pendapatan masyarakat dalam mendorong permintaan agregat. Pulau Jawa sebagai pusat perekonomian nasional, memiliki kombinasi ketiganya, kualitas SDM yang tinggi, jumlah tenaga kerja yang besar serta kebijakan UMP yang mengalami kenaikan setiap tahun menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan perekonomian. Dengan begitu, hasil penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan pembangunan ekonomi di Pulau Jawa perlu dilaksanakan secara terintegrasi melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penciptaan lapangan kerja produktif, serta kebijakan upah yang proporsional antara kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan usaha. Strategi kebijakan pembangunan secara parsial yang hanya fokus pada satu variabel pertumbuhan saja tidak akan optimal tanpa dukungan kebijakan antar sektor.

#### **KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis hasil regresi data panel dengan *Fixed Effect Model*, dapat

dsimpulkan bahwa IPM berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kenaikan IPM dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur jika tidak dibarengi dengan pemerataan wilayah dan hanya beberapa wilayah penopang ekonomi saja yang mengalami kenaikan, akibatnya secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi daerah akan mengalami penurunan. TPAK berpengaruh negatif dan tidak signifikan artinya jika terjadi penurunan pada tingkat partisipasi angkatan kerja maka pertumbuhan ekonomi daerah akan naik. Sedangkan UMP memiliki pengaruh positif signifikan terhadap PDRB, jika terjadi kenaikan UMP maka PDRB juga akan mengalami kenaikan. Hasil ini menunjukkan bahwa UMP merupakan indikator penting dalam meningkatkan kenaikan PDRB melalui peningkatan daya beli dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga memiliki kontribusi lebih pada pertumbuhan ekonomi daerah.

Keterbatasan penelitian ini pertama berada pada cakupan wilayah yang hanya menggunakan enam provinsi di Pulau Jawa sebagai lokasi penelitian, sedangkan Indonesia memiliki 34 provinsi. Kedua periode pengamatan pada 2015-2024 bisa menjadi periode yang relatif singkat untuk melihat dampak jangka panjang terutama pada variabel pembangunan manusia. Ketiga variabel independen yang digunakan hanya tiga variabel sehingga terdapat kemungkinan omitted variabel bias dari variabel lain yang belum dimasukkan ke dalam model. Keempat, penggunaan data sekunder memiliki keterbatasan pada ketersediaan data dan konsistensi perubahan metodologi data antar periode. Kelima model *fixed effect* belum sepenuhnya mengatasi potensi endogenitas seperti hubungan timbal balik antara pertumbuhan ekonomi dan IPM.

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan wilayah penelitian ke seluruh provinsi di Indonesia atau membandingkan kawasan timur Indonesia agar hasil penelitian lebih komprehensif. Kemudian bisa memperpanjang periode penelitian sehingga dapat melihat dampak jangka panjang dari kebijakan peningkatan IPM dan kebijakan upah terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi lebih terlihat. Selanjutnya bisa ditambahkan variabel lain yang mampu meningkatkan menjelaskan model dan pada metode analisis dapat dikembangkan dengan menggunakan Dynamic Panel Data (GMM), Random Effect atau Spatial Panel Regression untuk menangkap hubungan dinamis dan keterkaitan antar wilayah.

## DAFTAR REFERENSI

- Abdul Aziz, & Abdul Husenudin. (2024). Evaluasi Dampak Upah Minimum Regional dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Reduksi Tingkat Kemiskinan di Jawa Barat 2019-2023. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(6), 1450–1466. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i6.1771>
- Adim, A. (2024). Pengaruh Kemiskinan dan Pengangguran Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia 2018-2022. *Idarotuna : Journal of Administrative Science*, 5(2), 111–129. <https://doi.org/10.54471/idarotuna.v5i2.105>
- Ali Mauludi AC, Fadllan, & Fitri Nur Rahmawati. (2023). Pengaruh Pengaruh Upah Minimum, Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Belanja Modal Terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2017 s/d 2021. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 10(1), 68–83. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v10i1.8945>
- Eka Siburian, Meilany Dwi, Reneva Manurung, Risa Nabila, Dodi Siburian, & Nasrullah Hidayat. (2024). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Keuangan Digital terhadap

- Pertumbuhan Ekonomi. *Trending: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi*, 3(1), 186–195. <https://doi.org/10.30640/trending.v3i1.3671>
- Erian, P. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Dan Upah Minimum Kabupaten (Umk) Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Simalungun. *Jurnal Aplikasi Ilmu Ekonomi*, 1(1), 24–37.
- Ghinastri, S., & Syafitri, W. (2024). Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota (Umk) Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (Tpt) Dan Kemiskinan. *JOURNAL OF DEVELOPMENT ECONOMIC AND SOCIAL STUDIES*, 3(1), 72–83. <https://doi.org/10.1093/oseo/instance.00053443>
- Harsono, I., Purnama, I., Irwan, M., Muhammad, F., & Sutanto, H. (2024). The Influence Of Education Expenditure, Health Expenditure And Social Assistance Expenditure On Human Development Index In NTB Province In 2013-2022. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 5(1), 802–810. <http://journal.yrpiiku.com/index.php/msej>
- Jumain, A., & Basuki, A. T. (2025). Analisis Dampak Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Kemiskinan Dengan Pengangguran Sebagai Variabel Moderasi. 6(11), 92–104.
- Khairunnida, H., & Utomo, Y. P. (2024). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PDRB DI PROVINSI ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING GRDP IN YOGYAKARTA SPECIAL REGION. X(1), 31–40.
- Kusno, H. R., Ali, H. F., & Andini, S. L. (2023). The Effect of the Human Development Index (IPM) and Absorbed Labor on Economic Growth in East Java. *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Manajemen, Ekonomi, Keuangan Dan Bisnis*, 2(1), 65–80.
- Lubis Lestari Anggia. (2021). Pengaruh Upah Minimum Dan Pengangguran. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 4, 28–36.
- Martin, M. V. (2025). Pengaruh Penanaman Modal Asing ( PMA ), Penanaman Modal. 8, 23–37.
- Purba, D., Tarigan, I., Simamora, N., & Pardede, N. (2024). Laju Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara. *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE) Vol. 5, No. 2, April 2024*, 5(2), 275–283.
- Sari, Y., Nasrun, A., & Putri, A. K. (2020). Equity: Jurnal Ekonomi KEMISKINAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN / KOTA DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA. *Jurnal Ekonomi*, 8(1), 4–6.
- Sugiyono, S. (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D. *Bandung: Cv. Alfabeta*.
- UNDP. (2020). United Nations Development Programme: People, purpose. progress. *UN Partners with Whom We Worked Most Frequently on Poverty in 2020* 23, 2–25.
- Yuan, Y. D. P., Azizah, S. N. A., & Annisa, A. N. K. (2025). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Upah Minimum Regional, Penanaman Modal Asing dan Pertumbuhan Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (Jebma)*, 5(2), 306–316. <https://doi.org/10.47709/jebma.v5i2.6022>